

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH KOTA  
PAYAKUMBUH DALAM MENJALANKAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU COVID-19**

**Fitria Anggun Sari<sup>1b</sup>, Zikri Alhadi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial, Universitas Negeri Padang

<sup>b</sup>fitriaanggunsari@gmail.com

**Abstract**

*The purpose of this study was to determine the factors that affect the performance of the Payakumbuh City Government in carrying out the Regional Regulation on the Adaptation of New Habits of Covid-19. This research is located at the Payakumbuh City Regional Disaster Management Agency office, Payakumbuh City Satpol PP, and Payakumbuh City Covid-19 Task Force. This research was processed using qualitative analysis techniques using descriptive analysis methods and data collection methods in the form of interviews, observations, and documentation studies. The study results show that the factors affecting the effectiveness of the Payakumbuh city government's performance in implementing the Regional Regulation on Covid-19 Habit Adaptation are inadequate human resources and low public awareness of complying with health protocols.*

**Keyword:***Effectiveness, Covid-19, New Habit Adaptation*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menjalankan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19. Penelitian ini berlokasi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, Satpol PP Kota Payakumbuh, dan Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh. Penelitian ini diolah menggunakan teknik analisa kualitatif menggunakan metode analisa deskriptif, dan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintah kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Covid-19 adalah sumber daya manusia kurang memadai serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Covid-19, Adaptasi Kebiasaan Baru

**Pendahuluan**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang mempertegas tentang penerapan prokes (protokol kesehatan) yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, serta sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Menurut Agustina, dkk (2020:81) efektivitas adalah cara secara sadar menentukan sebelumnya sejumlah sumber daya dan peralatan untuk menghasilkan sejumlah barang untuk layanan yang dilakukan.

Norani, dkk (2015:2) mengatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran pencapaian suatu tujuan atau maksud yang telah ditentukan.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka ditegaskan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu menjelaskan keberhasilan pada sebuah organisasi mencapai sasaran serta tujuan yang diinginkan. Efektivitas dengan demikian dapat menekankan bagaimana suatu organisasi mencapai keberhasilan yang kehendakidan berpedoman pada rencana yang telah ditentukan.

Kota Payakumbuh tidak lagi berstatus zona hijau, setelah kasus pertama warga positif terjangkit Covid-19. Dengan berjalannya waktu kasus Covid-19 di Kota Payakumbuh warga yang positif terjangkit Covid-19 terus bertambah. Pemerintah Kota Payakumbuh dituntut untuk bisa mencegah dan mengurangi angka penambahan kasus positif setiap harinya. Untuk pencegahan Covid-19 berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Beberapa masyarakat Kota Payakumbuh menganggap bahwa Covid-19 ini hanyalah akal-akalan pemerintah yang tidak perlu ditakuti, bahkan beberapa masyarakat Kota Payakumbuh menganggap bahwa Covid-19 itu tidak ada. Untuk itu diperlukan sosialisasi Pemerintah agar masyarakat paham akan bahayanya pandemic Covid-19 yang sedang meraja lela di berbagai dunia termasuk juga Kota Payakumbuh, dan Pemerintah Kota Payakumbuh diuntut untuk selalu menghimbau menerapkan protokol kesehatan 3M kepada masyarakat yaitu mengenakan masker, membersihkan tangan serta mencuci tangan pakai sabun, selain itu juga menjaga jarak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik membuat artikel ini dengan judul faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menjalankan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode analisa deskriptif, yang dilakukan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, Satpol PP Kota Payakumbuh, dan Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh. Menentukan digunakan teknik *Accidental Sampling* dan *Purposive Sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasional dan studi dokumenter, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil Dan Pembahasan

Faktor penghambat dalam mencapai efektifitas kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Covid-19 adalah SDM yang kurang memadai serta kesadaran masyarakat yang masih rendah.

### 1. Sumber daya manusia yang kurang memadai

Pemerintah kota Payakumbuh telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peran masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdi Agus, ST selaku Ketua DPRD Kota Payakumbuh dan Anggota pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh mengatakan :

*“Pertama keterbatasan personil, teruma Satpol PP sebagai penegak perda, kalau Perda itu kan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pelaksananya bukan polisi, contoh masih ada café-café yang open (buka) tidak sesuai peraturan, kemudian masih terdapat pengunjung mematuhi peraturan yang ada, karena keterbatasan personil tadi tidak semua bisa dipantau” (wawancara tanggal 13 Januari 2022).*

Wawancara dengan Bapak Ricky Zandra, S. Sos (Kabid. Penegakan Peraturan Daerah (PPD) Satpol PP Kota Payakumbuh) dan Anggota pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh mengatakan :

*“Keterbatasan sumber daya manusia membuat pelaksanaan razia kurang efektif karena banyaknya masyarakat yang tidak terpantau ketika dalam waktu yang bersamaan memeriksa masyarakat yang lewat di jalan raya sehingga melarikan diri (wawancara 17 Januari 2022).*

Wawancara dengan Bapak Erizon, S.Sos, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh dan Sekretaris pada Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Payakumbuh mengatakan :

*“kalau SDM yang terkait dengan BPBD itu memang agak kurang memadai. Cuma kita ada membentuk kelompok masyarakat yang sifatnya membantu seperti KSB (Kelompok Siaga Bencana)” (wawancara 10 Januari 2022).*

Wawancara dengan Bapak Jasriyal, S.Pt selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP kota Payakumbuh dan Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh mengatakan :

*“Kami selaku penegak Perda serta menciptakan ketentraman masyarakat, membuat kantor Satpol PP kota Payakumbuh membagi jumlah anggota yang bekerja pada penanganan Covid-19 dan tempat-tempat yang meresahkan masyarakat, dengan keterbatasan personil tersebut dibentuk suatu satgas penanganan covid-19 yang terdiri dari anggota Satpol PP, polisi, BPBD dan pihak lain yang terkait” (wawancara tanggal 11 Januari 2022).*

Wawancara dengan ibu Riza Nofrida selaku Pengelola Surveilans Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, menjelaskan bahwa:

*“Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kota Payakumbuh membuat tim menjadi kewalahan, walaupun program tersebut sudah dijalankan dengan efektif, tetapi porsi pekerjaan yang dilakukan menjadi bertambah” (Wawancara Kamis, 13 Januari 2022).*

Dari hasil wawancara dengan informan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam mencapai efektivitas kinerja pemerintah kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Covid-19 adalah jumlah sumber daya yang dimiliki, dengan keterbatasan tersebut membuat anggota satgas memiliki pekerjaan yang *double* supaya dalam pelaksanaan penanggulangan dan mengendalikan Covid-19 dapat berjalan dengan efektif.

## **2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah**

Pemerintah kota Payakumbuh telah menerapkan peraturan tentang kebijakan pencegahan pandemi Covid-19 terhadap protokol kesehatan dengan maksimal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamdi Agus, ST selaku Ketua DPRD Kota Payakumbuh dan Anggota pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh mengatakan:

*“Kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya di kota Payakumbuh tampaknya masih rendah, karena masih terdapat masyarakat yang tidak memakai masker pada saat beraktivitas di tempat umum, selain itu tempat cuci tangan di tempat umum tidak digunakan sebagaimana mestinya” (wawancara 13 Januari 2022).*

Wawancara dengan Bapak Ricky Zaindra, S. Sos (Kabid Penegakan Peraturan Daerah (PPD) Satpol PP Kota Payakumbuh) dan Anggota pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh mengatakan :

*“Pertama pengawasan, kedua, pengertian perda tadi. Perda itu berbunyi. Kendala seperti susah masyarakat yang tidak patuh terhadap perda yang diberlakukan (membangkang). Contohnya dia sudah 3 kali melanggar maka akan diberikan sanksi. Kalau pelaku usaha yang melanggar akan diberi sanksi (wawancara tanggal 11 Januari 2022).*

Wawancara dengan Bapak Erizon, S.Sos, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh dan Sekretaris pada Satgtas Penanganan Covid-19 di Kota Payakumbuh mengatakan :

*“Kendalanya kadang-kadang masyarakat patuhnya ketika ada razia saja, ketika sudah tidak ada razia dan tidak ada petugas kadang-kadang sudah melanggar lagi prokesnya, baik sifat acara bersama maupun secara personnya, melanggar prokes secara kegiatan bersama seperti dilarang kenduri saat itu tapi masih melaksanakan kenduri yang pesta ramai-ramai” (wawancara 10 Januari 2022).*

Wawancara dengan Bapak Jasriyal, S.Pt selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP kota Payakumbuh dan Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan pada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh mengatakan :

*“Masih ada masyarakat yang tidak setuju saat dikenakan sanksi, sehingga Satpol PP harus memberikan penjelasan sampai mereka paham. Satpol PP melaksanakan razia ini dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dimasa pandemi ini” (wawancara 11 Januari 2022).*

Wawancara dengan Ibu Fitriwati selaku masyarakat Kota Payakumbuh yang melanggar protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19), menjelaskan bahwa:

*“Saya selaku masyarakat berbuat salah dengan melanggar peraturan yang telah di buat pemerintah dalam penanggulangan dan mengendalikan pandemi Covid-19 di kota Payakumbuh, saya menerima sanksi tersebut dengan kerja bakti, dan berjanji untuk tidak mengulangi permasalahan yang sama dan tetap menggunakan maskar supaya tujuan pemerintah dalam mencegah meluasnya Covid-19 dapat terwujud” (Wawancara 17 Januari 2022).*

Wawancara dengan Bapak Anggi Adres Saputra Karang Taruna Kota Payakumbuh Barat, tentang kesadaran masyarakat kota Payakumbuh untuk mematuhi peraturan yang berhubungan dengan Covid-19, yaitu:

*“Saya sebagai pemuda kota Payakumbuh merasa bangga membantu pemerintah untuk menanggulagi Pandemi Covid-19 dengan memberikan sosialisasi ke permukiman warga, tapi usaha yang saya lakukan tersebut sama sekali banyak yang diindahkan oleh masyarakat, dengan tidak menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah” (Wawancara 17 Januari 2022).*

Dari hasil wawancara dengan informan di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat kendala pemerintah kota Payakumbuh dalam menerapkan AKB adalah kesadaran masyarakat itu sendiri seperti masih terlihat masyarakat yang tidak mematuhi prokes serta mengabaikan peraturan dari pemerintah. Jadi sangat diharapkan peraturan yang diterapkan pemerintah dapat memotivasi masyarakat dan memudahkan pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Payakumbuh.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan telah menerapkan kebijakan tersebut dengan baik meskipun belum efektif karena melihat tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang di kota Payakumbuh. Namun, dalam pelaksanaannya itu kembali lagi kepada cara masyarakat terhadap protokol kesehatan masih bervariasi, masih ada yang tidak percaya. Oleh karena itu pemerintah juga harus berupaya untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat supaya mereka dapat memahaminya. Tetapi, masih saja ditemui faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintah kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Covid-19.

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia merupakan faktor penghambat dalam efektifitas kinerja pemerintah kota Payakumbuh dalam menerapkan AKB untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 sehingga satgas memiliki pekerjaan yang *double* agar Perda tersebut dapat berjalan dengan efektif. Melaksanakan program tersebut pemerintah kota Payakumbuh saling membantu-membantu agar kebijakan dapat terlaksana dengan maksimal. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota Payakumbuh sudah cukup baik tetapi tetap dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait sehingga memudahkan pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor eksternal bagi satgas penanganan Covid-19 di kota Payakumbuh dalam dalam menerapkan Perda AKB seperti masih terlihat masyarakat yang belum menjalankan prokes serta mengabaikan peraturan dari pemerintah. Jadi sangat diharapkan peraturan yang diterapkan pemerintah dapat memotivasi masyarakat dan memudahkan pemerintah dalam melakukan penanggulangan dan mengendalikan Covid-19 di Kota Payakumbuh. Jadi sangat diharapkan peraturan yang diterapkan pemerintah dapat memotivasi masyarakat dan memudahkan pemerintah dalam melakukan penanggulangan dan mengendalikan Covid-19 dikota Payakumbuh.

### Kesimpulan

Faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja pemerintah kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Covid-19 adalah SDM yang kurang memadai serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan pelaksanaan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) dapat menindak secara tegas bagi masyarakat maupun pejabat yang melanggar peraturan tersebut dengan memberikan sanksi yang lebih tegas tanpa terjadinya diskriminasi. Diharapkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kesadaran dari diri masing-masing untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini. Diharapkan pelaku usaha di kota Payakumbuh membatasi pelanggan yang tidak menggunakan prokes karena akan memperluas penyebaran Covid-19.

### Daftar Pustaka

- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fauzi, Akhmad, dkk. 2020. *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ravianto, J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi.
- Robbin, P. 2008. *Organizational Behavior, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan, Jakarta : Salemba Empat*.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Siagian, Sondang. P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Rajawali Press.
- Agustina, Y. N., Cikusin, Y., & Widodo, R. P. (2020). *Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. *Respon Publik*, 14(5).
- Norani, M., Amirullah, A. H., & Darwis, M. (2015). *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar*. *Jurnal Office*, 1(1), 1-7.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



# JPGDE

Journal Of Policy, Governance,  
Development and Empowerment

e\_ISSN =  
p\_ISSN =

Publisher :  
Center for Policy and Development Studies  
Faculty of Social Science Universitas Negeri Padang